

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
(LKjIP)**

**DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA  
PERSANDIAN DAN STATISTIK  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**



**TAHUN 2020**

## KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro Tahun 2020 ini merupakan perwujudan konkrit tingkat pencapaian kinerja (performing governance) sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Tahun 2020 yang telah ditetapkan sesuai dengan sasaran, tujuan dan target yang telah ditetapkan, sebagaimana diatur melalui ketentuan Peraturan Menteri pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja ini juga dapat dijadikan sebagai parameter atas keberhasilan/ kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran serta sekaligus merupakan media yang sistematis dalam upaya melakukan diagnosa guna mendeteksi sedini mungkin berbagai kelemahan/ kendala dan faktor-faktor yang mempengaruhinya sebagai perwujudan pemerintahan yang baik (good governance). Untuk itu, LKjIP yang telah disusun ini nantinya diharapkan mampu memberikan jawaban atas keterbatasan pengelolaan sumber daya yang tersedia sekaligus sebagai media pembelajaran dalam upaya peningkatan kinerja guna pencapaian tujuan organisasi.

Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2020 menyajikan informasi capaian kinerja sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2020 yang mengacu pada Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2018-2023.

Tembilahan, Januari 2021

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI  
INFORMATIKA PERSANDIAN DAN STATISTIK  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**



**TRIO BENI PUTRA, SE, MM**

Pembina (IV/a)

NIP. 19751126 199802 1 001

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	ii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1. Latar Belakang.....	1
2. Maksud dan Tujuan.....	1
3. Kedudukan .....	2
4. Tugas Pokok.....	2
5. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	3
6. Susunan Organisasi.....	4
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA .....</b>	<b>8</b>
1. Rencana Strategis (RENSTRA).....	8
a. Tujuan .....	8
b. Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2020.....	9
c. Indikator Kinerja Utama (IKU) .....	15
d. Perjanjian Kinerja .....	15
e. Arah Kebijakan dan Strategi .....	16
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>	<b>18</b>
1. Capaian Kinerja Organisasi .....	18
a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020 .....	18
b. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 dengan Tahun 2019 Serta Target Akhir Tahun 2023 .....	18
c. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir .....	20
d. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya .....	22
e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja .....	23
2. Realisasi Anggaran Tahun 2020.....	23
3. Penghargaan yang diterima.....	26
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>27</b>
<b>Lampiran</b>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Penilaian dan pelaporan kinerja Pemerintah Daerah menjadi salah satu kunci untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja Pemerintah Daerah. Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir. Proses penyusunan LKjIP dilakukan setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah, yang dalam hal ini adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir.

LKjIP menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung-jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2020. Disinilah esensi dari prinsip akuntabilitas sebagai pijakan bagi instansi pemerintah ditegakkan dan diwujudkan. Mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, LKjIP tingkat SKPD disampaikan kepada Bupati Indragiri Hilir melalui Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir selambat-lambatnya dua bulan setelah tahun anggaran berakhir.

### **B. Maksud dan Tujuan**

LKjIP Dinas Komunikasi dan Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi OPD selama kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi.

Penyusunan LKjIP juga menjadi alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja setiap unit organisasi Tujuan penyusunan LKjIP yaitu :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai.
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi Pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

### **C. Kedudukan**

Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik kabupaten Indragiri Hilir adalah merupakan lembaga teknis bidang Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik, yang melingkupi Bidang Pengelolaan, Pelayanan, Penyediaan dan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi dan Informasi, Bidang Pengembangan Infrastruktur, Manajemen Data Akses Internet, Bidang Pengembangan, Pengelolaan dan Penyelenggaraan Aplikasi, Bidang Persandian Dan Statistik yang dibentuk dengan Peraturan Bupati No. 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.

### **D. Tugas Pokok**

Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik kabupaten Indragiri Hilir mempunyai tugas melaksanakan sebagai tugas pemerintah dan pembangunan di bidang Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian kabupaten Indragiri Hilir yang diserahkan (Desentralisasi) dan yang diperbantukan kepada daerah di Kabupaten Indragiri Hilir dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

1. Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir adalah unit organisasi daerah Kabupaten Indragiri Hilir yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Indragiri Hilir.
2. Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

## **E. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir telah melakukan upaya-upaya maksimal dalam mencapai Visi dan Misi Kabupaten Indragiri Hilir.

### 1. Kebijakan pembangunan:

- Menyusun Perbup/Perda agar master plan e-gov menjadi acuan seluruh SKPD untuk membangun TI agar terintegrasi dan memudahkan pengelolaannya
- Membangun fasilitas data center berstandar internasional yang mengkonsolidasikan seluruh perangkat TI di tiap-tiap SKPD.
- Penyusunan kebijakan/aturan tata kelola TI, uraian jabatan dan tugas organisasi pengelola TI dan pemenuhan kebutuhan SDM untuk mengelola layanan TI dengan baik.
- Membangun aplikasi yang dapat mengintegrasikan aplikasi aplikasi di seluruh SKPD
- Memberikan pelatihan kepada seluruh SKPD untuk penggunaan e-office di setiap SKPD
- Menyajikan data/informasi yang bermanfaat melalui website Pemkab Inhil dan SKPD
- Penyediaan sarana dan prasarana TIK bagi masyarakat
- Peningkatan peran media massa dalam penyebaran informasi kepada masyarakat
- Peningkatan kualitas SDM aparatur dan masyarakat melalui pelatihan bidang komunikasi dan informatika
- Kerjasama dengan PT dan Lembaga Pelatihan TIK

### 2. Permasalahan dan hambatan :

- Terbatasnya sarana dan prasarana komunikasi dan informatika
- Masih rendahnya kuantitas dan kualitas aparatur di bidang TIK
- Kesenjangan digital di wilayah Kabupaten Indragiri Hilir (ketidak seimbangan pertumbuhan TIK)
- Belum optimalnya Layanan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir berbasis teknologi informasi
- Kurangnya akses masyarakat terhadap informasi
- Masih rendahnya komitmen pimpinan badan publik mengenai pentingnya peran PPID
- Keterbatasan kapasitas SDM pengelola informasi dan sarana prasarana komunikasi
- Belum adanya dorongan dan upaya secara optimal untuk melaksanakan fungsi pelayanan publik

## **F. Susunan Organisasi**

Dinas Komunikasi dan Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dan Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 47 Tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir, mempunyai Tugas dan Fungsi sebagai berikut :

### **1. Tugas**

Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dibidang komunikasi informatika persandian dan statistik.

### **2. Fungsi**

Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis urusan pemerintahan dibidang komunikasi informatika persandian dan statistik.
- b. Pelaksanaan tugas teknis urusan pemerintahan dibidang komunikasi informatika persandian dan statistik.
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas teknis urusan pemerintahan dibidang komunikasi informatika persandian dan statistik.
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi urusan pemerintahan dibidang komunikasi informatika persandian dan statistik
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **3. Struktur Organisasi**

Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir sesuai struktur organisasi dan tata kerja dengan struktur organisasi sebagai berikut:

#### **1. Kepala Dinas**

#### **2. Sekretariat, terdiri dari:**

- a. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan,
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian,
- c. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.

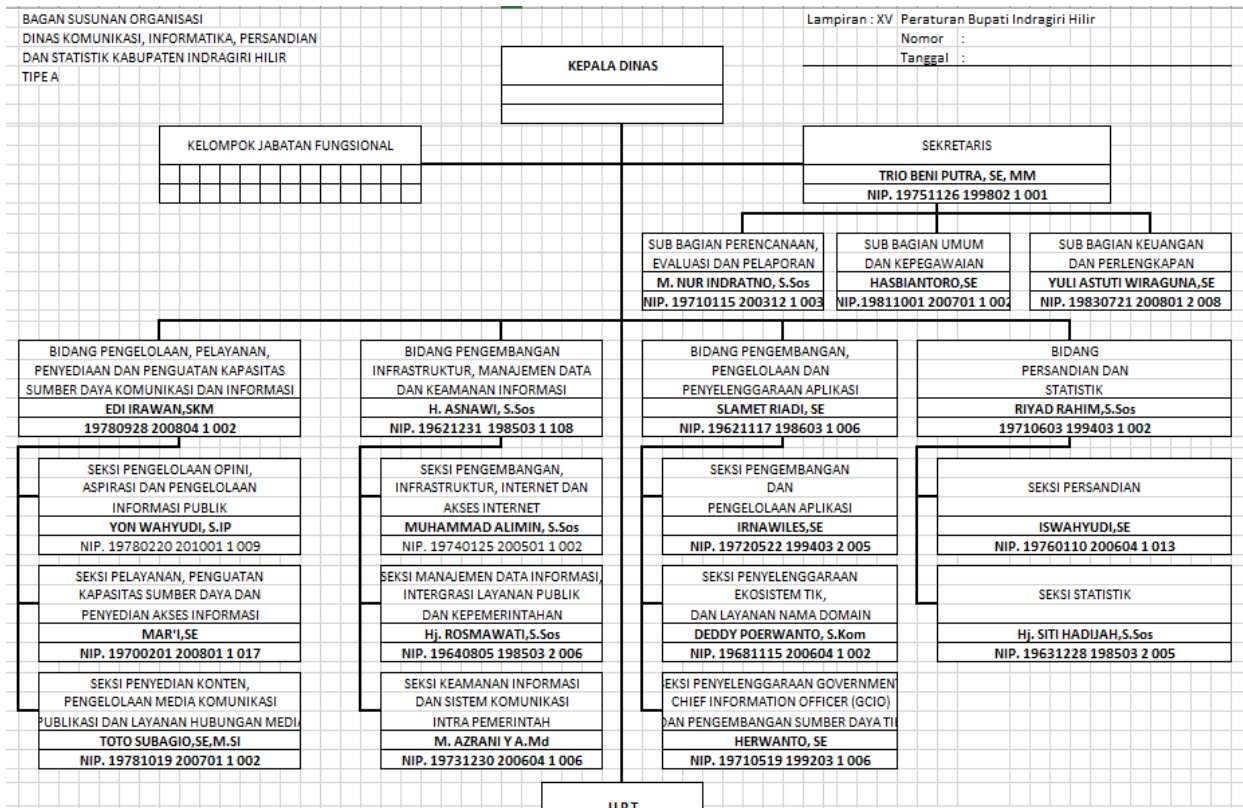
#### **3. Bidang Pengelolaan, Pelayanan, Penyediaan dan Penguatan Kapasitas Sumberdaya Komunikasi dan Informasi, terdiri dari:**

- a. Seksi Pengelolaan Opini, Aspirasi dan Pengelolaan Informasi Publik,
- b. Seksi Pelayanan, Penguatan Kapasitas Sumberdaya dan Penyediaan Akses Informasi, dan
- c. Seksi Penyediaan konten, Pengelolaan Media Komunikasi Publikasi dan Layanan Hubungan Media.

4. Bidang Pengembangan Infrastruktur, Manajemen Data dan Keamanan Informasi, terdiri dari:
  - a. Seksi Pengembangan, Infrastruktur, Internet dan Akses Internet,
  - b. Seksi Manajemen Data Informasi, Integrasi Layanan Publik dan Pemerintahan, dan
  - c. Seksi Keamanan Informasi dan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah.
5. Bidang Pengembangan, Pengelolaan dan Penyelenggaraan Aplikasi, terdiri dari:
  - a. Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi,
  - b. Seksi Penyelenggaraan Ekosistem TIK, dan Layanan Nama Domain, dan
  - c. Seksi Penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) dan Pengembangan Sumberdaya TIK.
6. Bidang Persandian dan Statistik, terdiri dari:
  - a. Seksi Persandian,
  - b. Seksi Statistik.
7. Kelompok Jabatan Fungsional

Bagan Struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir sebagaimana pada gambar 1.1. berikut:

**Gambar 1.1**  
**Bagan Struktur Organisasi**  
**Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir**



#### 4. Sumber Daya Yang Ada

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, Dinas Komunikasi Dan Informatika Persandian dan Statistik didukung oleh Sumberdaya Aparatur sebanyak 25 orang. Jika ditinjau dari berbagai klasifikasi sebagaimana ditunjukkan oleh berikut:

##### Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselon

Eselon II	: 1 Orang
Eselon III	: 1 Orang
Eselon IV	: 14 Orang

##### Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

Golongan IV/a	: 2 Orang
Golongan III/d	: 9 Orang
Golongan III/c	: 3 Orang
Golongan III/b	: 3 Orang
Golongan III/a	: 2 Orang
Golongan II/d	: 1 Orang
Golongan II/c	: 2 Orang
Golongan II/b	: 2 Orang
Golongan II/a	: 1 Orang

##### Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Formal

S2	: 2 Orang
S1	: 14 Orang
DIII	: 2 Orang
SLTA	: 7 Orang

##### Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Perjenjangan

Diklat PIM Tk.II	: -
Diklat PIM Tk.III	: -
Diklat PIM Tk.IV	: 6 Orang

Selain sumberdaya manusia, juga memiliki sarana dan prasarana penunjang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, antara lain:

##### a. Teknologi Informasi

- Infrastruktur Jaringan :
  - a. Ketersediaan jaringan Akses Internet dari Penyedia Layanan Internet TELKOM, bisa menggunakan Satelit langsung PT.Lintas Arta
  - b. Pemda Inhil mempunyai Tower dengan ketinggian 80 meter dibawah pengelolaan Diskominfops Kab.Inhil

- c. Sarana Prasarana pendukung Radio Indor dan Outdoor, Antena Wifi, serta perangkat pendukung lainnya
  - d. Adanya Server 2 buah yang dioperasikan Diskominfo Kab.Inhil untuk Website Pemda,dll
  - Aplikasi, tersedianya berbagai aplikasi sistem informasi pemerintahan daerah yang dikembangkan, sebanyak 23 aplikasi dengan rincian 17 aplikasi layanan publik dan 6 aplikasi dari Pemerintah.
- b. Komunikasi dan Informasi Publik
- Tersedianya media penyiaran, baik Radio Gemilang FM maupun Gemilang Tvmilik Pemkab.Inhil.
  - Kerjasama Penggunaan Satelit guna untuk menyebarluaskan siaran Gemilang TV dan Radio Gemilang FM.
  - Terjalannya kerjasama Media publikasi (media online, media elektronik, media cetak dan media luar ruang), alamat website Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir ([www.inhilkab.go.id](http://www.inhilkab.go.id)).
  - Tersedianya perangkat komputer yang memadai untuk kegiatan Media Center.
  - Data Center, melayani semua perangkat daerah ditunjang keamanan informasi dan persandian.
- c. Persandian dan Statistik
- Tersedianya data statistik sektoral.
  - Tersedianya email Sanapati untuk dipergunakan pengiriman dan penerimaan surat dari provinsi dan pusat.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **A. Rencana Strategis (RENSTRA)**

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir yang ada pada dokumen Renstra 2018-2023 mengacu pada Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2023, yaitu:

***“Untuk Kejayaan Inhil yang Semakin Maju, Bermarwah dan Bermartabat”***

Dinas Komunikasi dan Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir mendukung **Misi yang pertama** pada RPJMD Tahun 2018-2023, yaitu **Memantapkan tata kelola pemerintahan yang makin responsif, partisipatif, inovatif, efektif dan berketepatan hukum**. Tujuannya untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik, dengan sasaran tata kelola dan penyelenggaraan pemerintahan serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

Untuk mewujudkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2023, Dinas Komunikasi dan Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir sebagai salah satu Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan urusan pembantuan bidang komunikasi dan informasi, bidang statistik dan bidang persandian memiliki rencana strategis, yaitu:

#### **1. Tujuan**

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan sebagai hasil akhir yang dicapai atau dihasilkan dalam tahun 2013-2018. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Adapun tujuan, sasaran dan indikator kinerja yang akan dicapai selama periode perencanaan strategis dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1.

## Tujuan dan Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah

<b>Misi RPJMD</b>		Memantapkan tata kelola pemerintahan yang makin responsif, partisipatif, inovatif, efektif dan berkeetaatan hukum	
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Indikator Tujuan/Sasaran</b>	<b>Target 2020</b>
Terwujudnya Pelayanan Informasi Publik Terintegrasi		Nilai Keterbukaan Informasi	79
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Diskominfo	Nikai AKIP Diskominfo	B
	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan yang Berbasis Elektronik	Indeks Sistem Pemerintahan yang Berbasis Elektronik	2,0

## 2. Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2020

Perencanaan kinerja merupakan proses sangat penting dan harus dilakukan oleh organisasi karena dapat memberikan perspektif tentang apa yang akan dicapai ataupun dihasilkan oleh organisasi. Rencana Kinerja Tahunan digunakan untuk penyusunan skala prioritas kegiatan yang akan dilakukan pada tahun yang bersangkutan karena adanya batasan alokasi anggaran untuk SKPD. Dengan adanya rencana kinerja tahunan tersebut diharapkan pengelolaan program dan kegiatan benar-benar berdaya guna dan berhasil guna. Rencana Kinerja Tahunan disusun dengan mengacu pada Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir yang ditetapkan untuk pelaksanaan pembangunan pada tahun anggaran 20120. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2020.

Rencana Kinerja Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2020 mencakup 9 Program dan 35 Kegiatan, yaitu:

### 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, meliputi kegiatan:

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
- Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
- Penyediaan Alat Tulis Kantor
- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
  - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
  - Penyediaan Makanan dan Minuman
  - Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar daerah
  - Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran
  - Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
  - Penyediaan Jasa Keamanan Gedung Kantor
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, meliputi kegiatan :
- Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
  - Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas Operasional
  - Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
  - Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, meliputi kegiatan :
- Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur, meliputi kegiatan :
- Pendidikan dan Pelatihan Formal
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, meliputi kegiatan :
- Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
  - Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
6. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, meliputi kegiatan :
- Produksi Konten Informasi Publik
  - Penyediaan Informasi Publik dalam Rangka Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik
  - Penyebarluasan Informasi Publik Melalui Media
  - Pengelolaan Media Komunikasi Milik Pemerintah
7. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika, meliputi kegiatan :
- Layanan nama domain dan subdomain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan di lingkungan Pemerintah Daerah
  - Layanan Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Umum dan Aplikasi khusus yang terintegrasi
  - Pengembangan Sumberdaya TIK Pemerintah Daerah
  - Layanan Akses Internet, Intranet, dan Komunikasi Intra Pemerintah Daerah

- Layanan Manajemen Data dan Informasi Elektronik Pemerintah Daerah
- Layanan Infrastruktur dasar Data Center, Disaster Recovery Center dan TIK
- Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

8. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral, meliputi kegiatan :

- Pengolahan data statistik Sektoral

9. Program Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah, meliputi kegiatan :

- Pengembangan Layanan keamanan Informasi

Dari program dan kegiatan tersebut diatas faktor-faktor yang menjadi pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan adalah:

1. Pencapaian visi dan misi Kepala Daerah

Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir mendukung misi ke-1 pada RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2013-2018, yaitu “Memantapkan tata kelola pemerintahan yang makin responsif, partisipatif, inovatif, efektif dan berketepatan hukum”.

2. Pencapaian Standard Pelayanan Minimal (SPM)

Selain mendukung visi dan misi kepala daerah, kegiatan tahun 2020 juga sesuai dengan SPM yang ditetapkan Menteri Komunikasi dan Informatika.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020 Kabupaten Indragiri Hilir pada Dinas Komunikasi dan Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir secara detail dapat dilihat pada lampiran Tabel 2.2 berikut.

Tabel 2.2.  
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Tahun 2020

Kode		Uraian	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja (Kuantitatif)	Jumlah (Rp)
Prog	Keg				
01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Administrasi Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah		1.934.864.819
	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Menyurat yang terlayani	800 Lembar	656.000

	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening yang dibayarkan	2 Rekening	88.000.000
	006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan yang dipelihara/Perizinan kendaraan	3 Unit	12.000.000
	008	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah ruangan yang terjaga kebersihannya	5 Ruang	46.516.000
	010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah ATK yang disediakan	31 Ruang	23.702.000
	011	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Cetak dan Penggandaan	6 Item	6.485.000
	012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen kelistrikan yang disediakan	2 Jenis	3.600.000
	015	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis surat kabar/majalah yang disediakan	21 Item	21.770.000
	016	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah logistik yang disediakan	1500 Liter	18.790.000
	017	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	1 Kegiatan	211.179.000
	018	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar daerah	Jumlah Koordinasi dan konsultasi daerah yang dilaksanakan	69 Kali	377.949.419
	019	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran	Jumlah tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	66 Orang	1.003.600.000
	020	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi dalam daerah yang dilaksanakan	72 Kali	84.617.400
	027	Penyediaan Jasa Keamanan Gedung Kantor	Jumlah petugas keamanan yang dibayarkan	3 Orang	36.000.000
02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah		872.464.000
	005	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional	1 Unit	0
	024	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional yang terpelihara	3 Unit	37.000.000
	028	Pemeliharaan	Jumlah peralatan gedung	84 Unit	23.480.000

		Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	kantor yang terpelihara		000
	052	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Perlengkapan dan Peralatan kantor	1 Unit	811.984.000
03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Tingkat kedisiplinan aparatur Perangkat Daerah		7.510.000
	002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapan	20 Stel	7.510.000
05		Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Persentase peningkatan kualitas SDM Aparatur Perangkat Daerah		18.000.000
	001	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	2 Orang	18.000.000
06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase terwujudnya penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah		16.320.000
	001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan	7 Dokumen	10.020.000
	004	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Pelaporan Keuangan Akhir tahun yang disusun	1 Dokumen	6.300.000
21		Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase tersedianya layanan informasi dan komunikasi publik		9.853.270.581
	012	Produksi Konten Informasi Publik	Jumlah iklan layanan masyarakat, profil desa & talkshow yang dipublikasikan	32 Dokumentasi	120.744.000
	013	Penyediaan Informasi Publik dalam Rangka Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik	Cakupan Penyediaan Informasi Publik dalam Rangka Pelaksanaan Keterbukaan/Informasi Publik	90 Persen	51.865.000
	016	Penyebarluasan Informasi Publik Melalui Media	Jumlah kerjasama melalui media cetak, online dan TV	80 Media	8.832.263.900
	017	Pengelolaan Media Komunikasi Milik Pemerintah	Jumlah saluran informasi pemerintah berupa TV dan Radio Daerah	2 Buah	848.397.681
23		Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase terpenuhinya Sistem Pelayanan Informasi		1.691.787.500

			berbasisi TIK		
	001	Layanan nama domain dan subdomain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan di lingkungan Pemerintah Daerah	Jumlah Subdomain desa/kel dan Lembaga Pemerintah Daerah	20 Subdomain	55.382.500
	003	Layanan Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Umum dan Aplikasi khusus yang terintegrasi	Jumlah Pengembangan/Aplikasi/Update Website/dan Aplikasi Desa/Kel/Kec/OPD	3 Aplikasi	169.616.000
	004	Pengembangan Sumberdaya TIK Pemerintah Daerah	Jumlah SDM Pemerintah Daerah dibidang TIK	40 Orang	84.417.000
	010	Layanan Akses Internet, Intranet, dan Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Waktu berlangganan bandwith, Konektifitas akses internet, Intranet dan Komunikasi melalui Jaringan LAN maupun WAN sampai ketinggian Desa	12 Bulan	688.209.800
	011	Layanan Manajemen Data dan Informasi Elektronik Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen TIK yang dibuat	1 Dokumentasi	27.542.000
	012	Layanan Infrastruktur dasar Data Center, Disaster Recovery Center dan TIK	Jumlah jaringan dan Infrastruktur TIK yang dibangun sampai kedesa	10 Lokasi	448.343.200
	015	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah monitoring, evaluasi, dan pelaporan pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi, telephone seluler serta signal	280 Menara	218.277.000
16		Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase terpenuhinya Informasi/Data daerah		104.556.100
	002	Pengolahan data statistik Sektoral	Jumlah buku yang dicetak	100 Buku	104.556.100
16		Program Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Persentase terciptanya pengamanan informasi Pemerintah Daerah		127.662.000
	006	Pengembangan Layanan keamanan Informasi	Cakupan pengelolaan, identifikasi dan analisa keamanan terhadap informasi/aset/fasilitas/instalasi vital data dan informasi yang dikecualikan	90 Persen	127.662.000

### 3. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Dinas Komunikasi dan Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk mengukur keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan Indikator Kinerja Utama telah mengacu pada RPJMD dan Renstra Tahun 2018-2023. Adapun Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir yang menjadi acuan untuk periode tahun 2018-2023, sebagai berikut :

Tabel 2.2.  
Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2018-2023  
Dinas Komunikasi dan Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir

Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Indikator	Penjelasan/ Formulasi	Sumber Data
Terwujudnya Pelayanan Informasi Publik Terintegrasi		Nilai Keterbukaan Informasi	Hasil Penilaian dari Komisi Informasi Provinsi Riau	Komisi Informasi Provinsi Riau
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Diskominfops Kab.Inhil	Nilai AKIP Diskominfops Kab.Inhil	Hasil Penilaian dari Inspektorat Daerah	Inspektorat Kabupaten Indragiri Hilir
	Optimalisasi Tatakelola Pemerintah Berbasis Elektronik	Indeks Sistem Pemerintahan yang Berbasis Elektronik (SPBE)	Hasil Penilaian Indeks SPBE dari Kemenpan RB	Kemenpan RB

### 4. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh pejabat penerima amanah dalam hal ini Kepala SKPD kepada atasan langsung (Bupati) dalam ruang lingkup seluruh tugas pokok dan fungsi dengan memperhatikan sumber daya yang tersedia. Perjanjian kinerja disini merupakan penentuan target kinerja terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan. Program-program yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja merupakan program utama organisasi yaitu program yang dapat menggambarkan keberadaan organisasi serta menggambarkan issue strategic yang sedang dihadapi organisasi. Perjanjian kinerja didasarkan pada sasaran kinerja, indikator dan target yang telah dituangkan dalam rencana kinerja. Perjanjian kinerja ditandatangani oleh kepala SKPD dengan Bupati Indragiri Hilir (terlampir).

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Anggaran (Rp)
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Diskominfops	Nilai AKIP Diskominfops	B	Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.804.939.400
			Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	620.000.000
			Peningkatan Disiplin Aparatur	7.900.000
			Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	19.220.000
			Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	14.820.000
Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan yang Berbasis Elektronik	Indeks Sistem Pemerintahan yang Berbasis Elektronik (SPBE)	2.00	Pengelolaan Aplikasi Informatika	2.050.627.600
			Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	8.302.489.400
			Penyelenggaraan Statistik Sektoral	160.000.100
			Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	155.906.000

## 5. Arah Kebijakan dan Strategi

Arah kebijakan dan Strategi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro sebagaimana tercantum pada Renstra 2018-2023, tampak pada tabel 2.3. berikut:

Tabel 2.3.

## Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Visi : Untuk Kejayaan Inhil yang Semakin Maju, Bermarwah dan Bermartabat			
Misi 1 : Memantapkan tata kelola pemerintahan yang makin responsif, partisipatif, inovatif, efektif dan berketepatan hukum			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya Pelayanan Informasi Publik Terintegrasi	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Kominfops Kab. Inhil	Meningkatkan Manajemen Kinerja :	
		1. Optimalisasi pelayanan administrasi perkantoran	Pemenuhan kebutuhan operasional kinerja
		2. Peningkatan sarana prasarana aparatur	Penyediaan sarana prasarana kerja yang memadai
		3. Peningkatan disiplin dan kapasitas sumberdaya aparatur	Peningkatan mutu, pemberian reward dan punishment bagi aparatur
		4. Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Menyusun dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan
	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan yang berbasis Elektronik	Arsitektur TIK	1. Melaksanakan pembangunan/pemeliharaan infrastruktur
			2. Melaksanakan pembuatan/pemeliharaan aplikasi yang terintegrasi
			3. menyusun model arus bisnis aplikasi terintegrasi
		Tersedianya Pusat Data yang terintegrasi	Membuat regulasi dan pelaksanaan satu data kab. Inhil
		Pengamanan Sistem Informasi	Melakukan tatakelola pengamanan sistem
		Optimalisasi Informasi dan Komunikasi Publik	Peningkatan kualitas pelayanan publik

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. Capaian Kinerja Organisasi

##### 1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro Tahun 2020 sebagaimana tabel 3.1. berikut:

Tabel 3.1.

Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis  
Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Persandian dan Statistik  
Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2020

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian (%)
		Renstra 2020		
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Diskominfops Kab.Inhil	Nilai AKIP Diskominfops Kab.Inhil	98%	95,19%	98%
Optimalisasi Tatakelola Pemerintah Berbasis Elektronik	Indeks Sistem Pemerintahan yang Berbasis Elektronik (SPBE)			

Berdasarkan tabel 3.1. diatas maka tingkat capaian target sasaran strategis Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2020 adalah 98%

##### 2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 dengan Tahun 2019 Serta Target Akhir Tahun 2023

Data realisasi kinerja Tahun 2020 mempunyai indikator yang berbeda dengan tahun sebelumnya. Adapun data pencapaian target dan realisasi kinerja sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2020 sebagaimana tabel 3.2. berikut :

Tabel 3.2.

Realisasi Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2020

Indikator Kinerja	2020		
	Target	Realisasi	Capaian (%)
Nilai AKIP Diskominfops Kab.Inhil	98%	95,19%	98%
Indeks Sistem Pemerintahan yang Berbasis Elektronik (SPBE)			

Sedangkan realisasi kinerja sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019 sebagaimana tabel 3.3. berikut:

Tabel 3.3.  
Realisasi Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2019 Serta Target Akhir Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	2019			2023		
		Target	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Target	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Jumlah Media Center Milik Pemda yang terpenuhi	100%	178.240	90,29%	100%	530.000	-
2	Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%	146.594	92,62%	100%	1.175.440	-
3	Jumlah Dokumen Pelaporan yang disusun	8 Dok	103.144	96,49%	8 Dok	140.000	-
4	Jumlah Pelayanan Administrasi Kantor Yang tersedia dalam mutu/waktu yang sesuai kebutuhan	100%	747.478	99,53%	100%	3.668.000	-
5	Jumlah Pengembangan Sistem E-Government yang dilayani	9 Lokasi	286.388	68,35%	8 Lokasi	3.300.000	-
6	Jumlah Aksetabilitas Informasi yang terpenuhi	20 Kec	521.203	92,73%	20 Kec	600.000	-
7	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Teknis/Bimtek yang terlaksana	2 Orang	23.190	100%	5 Orang	500.000	-

### 3. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir

Dalam penerapan rencana program kegiatan berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir pada umumnya terdapat permasalahan yang timbul dari belum optimalnya pemanfaatan kekuatan (potensi SKPD), kelemahan yang belum dapat diatasi, peluang yang belum dapat di manfaatkan serta ancaman dari luar yang tidak diantisipasi. Didalam penyusunan Renstra PD ini perlu diidentifikasi terlebih dahulu permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Komunikasi Informatika , Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir agar rencana yang disusun dapat meminimalkan atau menyelesaikan masalah tersebut dengan tepat.

Permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir periode 2018-2023 sebagai berikut:

- Masih Kurangnya Sarana Prasarana Pendukung Teknologi Informasi
- Ketersediaan Fasilitas Internet di Desa dan Kecamatan yang masih terbatas.
- Belum seimbangya antara kebutuhan dengan penyediaan sarana dan prasarana Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik.
- Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk memelihara fasilitas yang di berikan pemerintah melalui Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir.
- Belum adanya Fasilitas bagi Staf Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik yang berada di Kecamatan.
- Minimnya Anggaran Pemerintah Daerah Untuk Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) dikarenakan Besarnya Biaya Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi (TIK).
- Kurangnya SDM Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik yang mempunyai latar belakang teknis dan kecilnya peluang dalam mengikuti diklat.
- Belum optimalnya sarana prasarana teknologi informasi dan komunikasi yang disediakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.
- Belum berkembangnya integrasi jaringan seluruh SKPD yang didukung dengan implementasi teknologi informasi dan komunikasi.
- Belum optimalnya pengelolaan dan pengembangan database sehingga implementasi e-government belum sepenuhnya didukung oleh ketersediaan data akurat, cepat, dan tepat.
- Belum optimalnya regulasi yang dimiliki Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir untuk menunjang program transportasi dan komunikasi dan informatika.

Upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut yaitu:

#### 1. Kabupaten Indragiri Hilir Menuju Kota Smart City

Kabupaten Indragiri Hilir sebagai daerah yang menuju kota Smart City memiliki makna bahwa diharapkan untuk kedepannya Kabupaten Indragiri Hilir memiliki manfaat dari keberadaan teknologi komunikasi dan informasi yang dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir dalam bentuk peningkatan pelayanan publik yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

#### 2. Pengadaan Barang Dan Jasa Berbasis Elektronik.

Mengimplementasikan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang lebih transparan dan dapat diakses serta diikuti oleh lebih banyak lagi peserta pengadaan sehingga dapat menimbulkan persaingan yang sehat dan lebih transparan.

#### 3. Pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir Yang Berbasis Inhil Satu Data.

Pembangunan daerah Kabupaten Indragiri Hilir yang dimulai dari proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan haruslah di dasarkan atau dilandasi kepada Data dan informasi yang akurat dan terbaru guna memberikan dukungan kepada Pemerintah dalam melaksanakan fungsinya dalam penentuan arah dan sasaran pembangunan. Hal tersebut dapat terjadi manakala terfasilitasi dengan baik melalui pengintegrasian secara terpadu antara pengumpulan dan pengolahan data dan informasi dengan berbasis kepada Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Satu Data Kabupaten Indragiri Hilir.

#### 4. Pelaksanaan Dan Penerapan Sistem e-Government.

Memberikan layanan yang maksimal kepada masyarakat adalah salah satu tujuan dari pelaksanaan segala urusan yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir yang terdiri dari beberapa urusan wajib. Hal tersebut dapatlah terlaksana secara optimal apabila dilakukan dengan menggunakan Teknologi Sistem Informasi dan Komunikasi masing-masing urusan, yang semula hanya dilaksanakan secara manual sehingga membutuhkan tenaga, waktu dan biaya yang besar pula dan hal ini tentunya jauh dari apa yang diinginkan oleh pelaksanaan *e-Gov.* yaitu salah satunya azas efisiensi dan efektifitas pengelolaan pemerintahan.

#### 5. Keterbukaan dan Transparansi Informasi Bagi Masyarakat

Seiring dengan semakin berubahnya pola pikir masyarakat yang semakin maju, kritis, dan berkembang membuat tuntutan terhadap keterbukaan dan transparansi akan data dan informasi semakin tinggi pula. Hal ini berimbas kepada semakin kritis dan beraninya masyarakat terhadap akses dalam menyampaikan pendapat dan akan

terus berupaya untuk mencari informasi yang relevan dengan situasi dan kondisi yang sedang dihadapinya

#### 6. Pemenuhan Kebutuhan Masyarakat akan Teknologi Komunikasi dan Informasi Berbasis Kearifan Lokal

Perkembangan teknologi pada bidang komunikasi dan informasi yang semakin berkembang dengan pesat dan cepat peril di respon dan dilakukan antisipasi terhadap dampak yang akan timbul baik itu dampak positif maupun negatif. Hal ini dapat terjadi apabila Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir bersikap responsive dan antisipatif melalui pelaksanaan dan pengembangan program-program dan kegiatan-kegiatan yang bersifat pemanfaatan terhadap kebijakan-kebijakan atau kearifan lokal yang masih ada dan bertahan di tengah masyarakat saat ini.

#### 4. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

Efisiensi Penggunaan Sumberdaya pada Dinas Komunikasi dan Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2020 meliputi:

##### a. Keuangan

Efisiensi penggunaan anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir dalam rangka mencapai sasaran strategis sesuai dengan IKU Tahun 2020 sebesar 98%, yaitu dari pagu anggaran sebesar Rp. 14.626.435.000,- realisasi sebesar Rp.13.922.813.706,- dengan demikian mengalami efisiensi sebesar Rp. 703.621.294,-.

##### b. Sarana dan Prasarana

Efisiensi dalam penggunaan sarana dan prasarana antara lain dapat dilihat dari:

- Pemanfaatan dalam pengelolaan teknologi dan informasi menggunakan Aplikasi INPAS sehingga masyarakat mendapatkan informasi apa yang ingin dicari.
- Pemanfaatan Satelit dan Menara dalam memperluas penyebaran informasi melalui media.
- Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk pengumpulan dan pengelolaan database daerah, sehingga penyampaian informasi dapat dilakukan dengan real time sebelum pengiriman dokumen fisik.
- Dalam pengelolaan keamanan informasi dan persandian berbasis IT, menggunakan metode enkripsi yang dikembangkan pada semua aplikasi dan peralatan jaringan komputer. Hal ini dilakukan untuk menghemat biaya yang harus dikeluarkan bila menggunakan pihak ketiga.

### c. Sumberdaya Manusia

Dengan didukung jumlah SDM dari formasi sesuai dengan Peta Jabatan, Dinas Komunikasi dan Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir dapat memperoleh capaian kinerja 98%. Hal ini dilakukan antara lain dengan melaksanakan penambahan beban tugas dan jam kerja pegawai serta memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelaksanaan tugas, serta melibatkan tim teknis pada beberapa kegiatan. Namun demikian hal tersebut bukan merupakan kondisi yang ideal bagi organisasi. Apabila kondisi tersebut terus berlangsung akan menurunkan kinerja personil yang berdampak kepada menurunnya kinerja organisasi.

5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja yaitu:

Program/kegiatan yang menunjang pencapaian sasaran ini antara lain:

- Terintegrasinya aplikasi layanan publik INPAS.
- Adanya dukungan dari SKPD yang menangani sendiri peralatan jaringan lingkup internal SKPD sehingga pengelola jaringan kabupaten bisa fokus menangani jaringan utama (backbound) antar SKPD, serta dukungan dari SKPD yang berusaha mengamankan sendiri setiap perangkat yang digunakan terutama data dan aplikasi.
- Dukungan dari semua SKPD dan Desa dalam implementasi tata kelola teknologi informasi.
- Dukungan dari semua SKPD lingkup Pemkab Indragiri Hilir dalam publikasi melalui website dan interpersonal dapat membantu penyampaian informasi kepada masyarakat, meskipun publikasi melalui media cetak dan media luar ruang.
- Dukungan dari semua SKPD lingkup Pemkab Indragiri Hilir dan Instansi yang mempunyai satu tekad yaitu melayani masyarakat Indragiri Hilir.

## **B. Realisasi Anggaran Tahun 2020**

Total Anggaran pada Dinas Komunikasi dan Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir pada APBD Tahun 2020 sebesar Rp. 12.159.647.400,- Namun dalam tahun berjalan, terjadi pandemi Covid-19 yang membuat Dinas Komunikasi Informasika Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiti Hilir harus melakukan Rasionalisasi menjadi 14.626.435.000,-. Oleh sebab itu penambahan anggaran tersebut antara lain digunakan untuk percepatan penanganan penanggulangan Covid-19.

Secara umum pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2020 dapat

terlaksana dengan baik sesuai target. Namun masih ada kegiatan yang kurang maksimal karena tidak sesuai dengan jadwal yang sudah direncanakan, secara umum dijelaskan dalam Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020 sebagaimana table berikut :

Tabel 3.4.  
 Penambahan Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika  
 Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir  
 Setelah Dilakukan P-APBD Per Program Tahun 2020 Akibat Pandemi Covid-19

No	Program/Kegiatan	Jumlah (Rp)		Bertambah/ Berkurang	%
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.640.717.400	1.934.864.819	294.147.419	17,93
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	137.500.000	872.464.000	734.964.000	534,52
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	7.900.000	7.510.000	(390.000)	-4,94
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	19.220.000	18.000.000	(1.220.000)	-6,35
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	14.820.000	16.320.000	1.500.000	10,12
6	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	7.782.970.400	9.853.270.581	2.070.300.181	26,60
7	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	2.239.739.500	1.691.787.500	(547.952.000)	-24,46
8	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	160.000.100	104.556.100	(55.444.000)	-34,65
9	Program Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	156.780.000	127.662.000	(29.118.000)	-18,57
<b>Total</b>		<b>12.159.647.400</b>	<b>14.626.435.000</b>	<b>2.466.787.600</b>	<b>20</b>

Tabel 3.5.  
 Pagu dan Realisasi Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika  
 Persandian dan Statistik kabupaten Indragiri Hilir  
 Setelah Dilakukan P-APBD Per Program Tahun 2020

No	Program/Kegiatan	Anggaran		Sisa Anggaran (Rp)
		Pagu (Rp)	Realisasi (%)	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.934.864.819	1.726.049.516	208.815.303
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	872.464.000	727.590.000	144.874.000
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	7.510.000	7.510.000	0
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	18.000.000	8.000.000	10.000.000
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	16.320.000	15.000.000	1.320.000
6	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	9.853.270.581	9.749.012.874	104.257.709
7	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	1.691.787.500	1.475.823.418	215.964.082
8	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	104.556.100	101.766.100	2.790.000
9	Program Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	127.662.000	112.061.800	15.600.200
<b>Jumlah</b>		<b>14.626.435.000</b>	<b>13.922.813.706</b>	<b>703.621.294</b>

### C. Penghargaan Yang Diterima

Penghargaan yang diterima Dinas Komunikasi dan Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2020 antara lain sebagai berikut:

Tabel 3.6.  
Pencapaian Prestasi Urusan Komunikasi dan Informatika  
Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2020

No	Penghargaan	Prestasi	Bulan	Penyelenggara
1	peringkat 2 (kedua) pada penghargaan Komisi Informasi (KI Award) Provinsi Riau tahun 2020 untuk kategori Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau	Anugerah Keterbukaan Informasi Publik KI Riau Award 2020	12 November 2020	Komisi Informasi Provinsi Riau

## **BAB IV PENUTUP**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir disusun dalam rangka pertanggung jawaban tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijaksanaan pemerintah daerah. Laporan kinerja merupakan suatu hal yang sangat penting untuk mengetahui berbagai persoalan pembangunan sebagai wujud nyata tanggung jawab pemerintah dalam menghadapi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan transparansi sebagai nafas setiap gerak dan aktivitas pembangunan dalam upaya menciptakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sesuai dengan tuntutan paradigma baru. Pelaksanaan program kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2020 secara umum tercapai 98%. Walaupun hasil kinerja yang didapat semakin meningkat, namun masih terdapat beberapa upaya perbaikan yang dapat dilakukan antara lain:

1. Melakukan penyempurnaan dan pengembangan tata kelola kelembagaan dalam mendukung Reformasi Birokrasi. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi difokuskan pada upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.
2. Melakukan pemantauan dan evaluasi capaian kinerja secara berkala dan berjenjang dari kinerja individu sampai tingkat lembaga dengan memanfaatkan prasarana yang ada, antara lain pemantauan kinerja, aplikasi penatausahaan keuangan, untuk meningkatkan hasil penilaian SAKIP SKPD.
3. Melakukan peningkatan kompetensi SDM aparatur perencana bidang Informasi Komunikasi Publik dan bidang TIK, agar dapat menyusun rencana jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek, serta cepat tanggap dalam memprediksi dan mendeteksi dini perubahan lingkungan strategis Kabupaten, Provinsi dan Nasional.

Dengan laporan kinerja yang dapat kami sampaikan, semoga dapat diterima dengan baik oleh semua pihak yang berkepentingan. Apabila masih banyak terdapat kekurangan atas laporan ini, kami mohon maaf dan akan kami lakukan perbaikan agar menjadi lebih baik untuk tahun-tahun berikutnya.

Tembilahan, Januari 2021  
**KEPALA DINAS KOMUNIKASI  
INFORMATIKA PERSANDIAN DAN STATISTIK  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**



**TRIO BENI PUTRA, SE, MM**

Pembina (IV/a)

NIP. 19751126 199802 1 001

# LAMPIRAN

# Anugerah KI Award 2020, Inhil Sabet Peringkat II Keterbukaan Informasi Publik



Pekanbaru – Prestasi membanggakan kembali diukir Kabupaten Indragiri Hilir. Kali ini kabupaten yang dikenal dengan negeri hamparan kelapa dunia ini berhasil melenggang menyabet peringkat 2 (kedua) pada penghargaan Komisi Informasi (KI Award) Provinsi Riau tahun 2020 untuk kategori Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau setelah Kabupaten Bengkalis sebagai kabupten dengan kualifikasi menuju Informatif dengan nilai 95 pada malam puncak anugerah komisi Informasi Riau Award yang dilaksanakan di Pekanbaru, Kamis (12/11/2020).

Penghargaan tersebut di serahkan langsung oleh Gubernur Riau Drs. H Samsuar kepada Bupati Indragiri Hilir H.M Wardan pada acara Anugerah Keterbukaan Informasi Publik KI Riau Award 2020 yang di laksanakan di Ballroom Hotel Grand Central Pekanbaru, Kamis (12/11/2020) malam.

Ketua Komisi Informasi Provisi Riau Zufra Irwan menjelaskan "KI Riau Award" merupakan kegiatan tahunan KI Riau untuk pemeringkatan badan publik dan evaluasi Badan Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) terhadap UU No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) di Provinsi Riau.

Usai menerima penghargaan, Bupati Indragiri Hilir Drs. H.M Wardan mengatakan penghargaan yang di raih Pemerintah Kabupaten Inhil ini akan menjadi motivasi bagi kita untuk lebih meningkatkan lagi dalam hal keterbukaan informasi publik yang lebih baik lagi.

“Keberhasilan dan prestasi yang kita raih hari ini tidak dapat sebegitu saja kita raih, tapi tentunya sudah melalui proses penilaian yang cukup panjang dan merupakan hasil dari upaya, usaha secara bersama-sama Pemerintah, Instansi terkait Serta didukung oleh semua komponen termasuk seluruh masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir, Dan ini akan menjadi motivasi untuk Kita semua agar lebih baik lagi untuk untuk tahun-tahun yang akan datang, lanjut Bupati.

Link : <https://www.riauupdate.com/2020/11/anugerah-ki-award-2020-inhil-sabet.html?fbclid=IwAR11UKaT91y4Ij-0k4aMy-PrzLAlnW4KOWu1HVLDYtNhrSHsui1VNRz5wec>



**PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**  
**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA**  
**PERSANDIAN DAN STATISTIK**

Jalan Swarna Bumi Gedung multiyears Lt.5 Tembilahan  
Email : [kominfopersantik@inhilkab.go.id](mailto:kominfopersantik@inhilkab.go.id) / [kominfoinhil@gmail.com](mailto:kominfoinhil@gmail.com)



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA**  
**PERSANDIAN DAN STATISTIK KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**  
**Nomor: Ktsp. 188/HK/KOMINFO-PS/I/2021/**

**TENTANG**

**TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2020**

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA**  
**PERSANDIAN DAN STATISTIK KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Bupati Indragiri Hilir Nomor: 060/ORG-KRB/1242.83 Tanggal 28 Desember 2020 tentang Permintaan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2020
- b. Bahwa dalam rangka tertib administrasi serta kelancaran dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2020 maka dipandang perlu menyusun Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2020
- c. Bahwa dengan pertimbangan point a dan b tersebut di atas, perlu diatur dengan diterbitkan Surat Keputusan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Diskominfo PS tahun 2020 dengan susunan sebagaimana terlampir.
- Mengingat : 1. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan) Nomor SE/31/M.PAN/12/2004 tentang Penetapan Kinerja serta sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi
2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah.
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 29 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

- Pertama : Menetapkan susunan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi, Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir sebagaimana terlampir dalam lampiran surat keputusan ini.
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- Ketiga : Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tembilahan  
Pada Tanggal : 04 Januari 2021

Tembilahan, Januari 2021  
**KEPALA DINAS KOMUNIKASI  
INFORMATIKA PERSANDIAN DAN STATISTIK  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**



**TRIO BENI PUTRA, SE, MM**  
Pembina (IV/a)  
NIP. 19751126 199802 1 001

Lampiran : Kepala Dinas Komunikasi, Informatika  
Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri  
Hilir

Nomor : Ktsp.188/HK/KOMINFO- PS/I/2021  
Tanggal : 04 Januari 2021

Susunan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)  
Dinas Komunikasi, Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir

No	Nama/NIP/Pangkat/Gol.Ruang	Jabatan	Ditunjuk Sebagai
1	TRIO BENI PUTRA, SE.MM Nip.19751126 199802 1 001 Pembina (IV/a)	- Kepala Dinas Kominfo PS Kab Inhil	Penanggung Jawab
2	RIYAD RAHIM, S.SOS Nip.19710603 199403 1 002 Pembina (IV/a)	- Plh. Sekretaris Dinas Kominfo PS Kab Inhil - Kabid Persandian dan Statistik	Ketua
3	MUHAMMAD NUR INDRATNO, S.SOS Nip.19710115 200312 1 003 Penata Tk.I (III/d)	- Kasubbag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Sekretaris
4	HERWANTO, SE Nip.19710519 119203 1 006 Penata Tk.I (III/d)	- Plh. Kabid Pengembangan Infrastruktur, Manejemen data Akses Internet	Anggota
5	ISWAHYUDI, SE Nip.19760110 200604 1 013 Penata Tk.I (III/d)	- Plh. Kabid Pengembangan, Pengelolaan dan Penyelenggaraan Aplikasi	Anggota
6	HASBIANTORO, SE Nip.19811001 200701 1 002 Penata Tk.I (III/d)	- Plh. Kabid Pengelolaan, Pelayanan, Penyediaan dan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi dan Informasi - Kasubbag umum dan Kepegawaian	Anggota
7	HANDRI YANTI, SE Nip.19780501 199802 2 001 Penata Tk.I (III/d)	- Staf Analis Perencanaan	Anggota

Tembilahan, Januari 2021  
**KEPALA DINAS KOMUNIKASI  
INFORMATIKA PERSANDIAN DAN STATISTIK  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**



**TRIO BENI PUTRA, SE, MM**  
Pembina (IV/a)  
NIP. 19751126 199802 1 001